

## Analisis *Maşlahah Mursalah* dalam Penulisan Nama pada Batu Nisan

### *Analysis of Maşlahah Mursalah in Writing Names on Tombstones*

**Wahid Cahaya Agam**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [wahidibn2010@gmail.com](mailto:wahidibn2010@gmail.com)

**Sirajuddin**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [sirajuddin@stiba.ac.id](mailto:sirajuddin@stiba.ac.id)

**Muhammad Rezky Fauzy**

Institut Agama Islam STIBA Makassar, Indonesia

Email: [muhrezkyfauzy@gmail.com](mailto:muhrezkyfauzy@gmail.com)

Article Info	Abstract
Received : 27 July 2025 Revised : 28 July 2025 Accepted : 30 July 2025 Published : 31 July 2025	<p><i>This study aims to analyse the application of the concept of maşlahah mursalah in the practice of writing names on tombstones, by considering the views of scholars from various madhhabs regarding the law of writing on graves. In addition, this study also aims to evaluate the extent to which writing names on tombstones can provide benefits for the community, such as facilitating grave identification. This research uses a qualitative approach with a library research method. The data analysed is qualitative and studied through a normative approach, and strengthened by comparative and conceptual approaches. Data analysis was conducted qualitatively using the deductive method to draw conclusions based on relevant general principles. The results show that there are four opinions regarding the law of writing names on tombstones: 1. Makruh (Hanafī, Maliki, Shafi, Hambali schools of thought), 2. Mubah (Zāhirī school of thought), 3. Haram (al-Shukānī, al-Sindī, al-‘Irāqī, al-Zahabī, Ibn al-Hājj, Ibn Bāz, al-Lajnah al-Dāimah), 4. Permitted with conditions (Ibn Nujaim, al-Zayla‘ī, Badruddīn al-‘Ainī, al-Albānī, Ibn ‘Uṣaimīn, Dār al-Iftā’ al-Miṣriyah). The results also show that the writing of names on tombstones is not so relevant to maşlahah mursalah, rather it is related to the general benefit and the objectives of the Shari’ah. This research is important to find out the opinions of the schools of fiqh regarding this issue and to find out the implications of its application. It is hoped that Muslims can gain a deeper and clearer understanding, so that all forms of doubt or confusion about fiqh law related to these issues can be eliminated.</i></p>
<b>Keywords:</b> Analysis, Maşlahah Mursalah, Writing Names, Tombstones	
<b>Kata kunci:</b> Analisis, Maşlahah Mursalah, Penulisan Nama, Batu Nisan	
<b>Copyright:</b> 2024, Wahid Cahaya Agam, Sirajuddin, Muhammad Rezky Fauzy	<p><b>Abstrak</b></p> <p>Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan konsep <i>maşlahah mursalah</i> dalam praktik penulisan nama pada batu nisan, dengan mempertimbangkan pandangan para ulama dari berbagai mazhab mengenai hukum penulisan di atas makam. Selain itu, penelitian ini juga bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana penulisan nama pada batu nisan dapat memberikan kemaslahatan bagi</p>

masyarakat, seperti memudahkan identifikasi makam. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (library research). Data yang dianalisis bersifat kualitatif dan dikaji melalui pendekatan normatif, serta diperkuat dengan pendekatan komparatif dan konseptual. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deduktif untuk menarik kesimpulan berdasarkan prinsip-prinsip umum yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada empat pendapat terkait hukum penulisan nama pada batu nisan, 1. Makruh (mazhab Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali), 2. Mubah (mazhab *Zāhiri*), 3. Haram (al-Syaukānī, al-Sindī, al-'Irāqī, al-Ḍahabī, Ibnu al-Hājj, Ibnu Bāz, *al-Lajnah al-Dāimah*), 4. Boleh dengan syarat (Ibnu Nujaim, al-Zayla'ī, Badruddīn al-'Ainī, al-Albānī, Ibnu 'Usaimīn, *Dār al-Iftā' al-Miṣriyah*). Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa penulisan nama pada batu nisan tidak begitu relevan dengan *maṣlaḥah mursalah*, lebih tepatnya adalah keterkaitannya dengan kemaslahatan secara umum dan tujuan syariat. Penelitian ini penting untuk mengetahui pendapat mazhab-mazhab fikih terkait permasalahan tersebut serta untuk mengetahui implikasi pada penerapannya. Diharapkan umat Islam dapat memperoleh pemahaman yang lebih mendalam dan jelas, sehingga segala bentuk keraguan atau kebingungan mengenai hukum fikih terkait permasalahan tersebut dapat dihilangkan.



This work is licensed under a Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0)

**How to cite:** Wahid Cahaya Agam, Sirajuddin, Muhammad Rezky Fauzy. "Analisis Maṣlaḥah Mursalah dalam Penulisan Nama pada Batu Nisan", AL-FIKRAH: Jurnal Kajian Islam, Vol. 2, No. 1 (2025): 1-20. doi: 10.36701/fikrah.v2i1.2350.

## PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Mā'idah/5: 3:

الْيَوْمَ أَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَأَتَمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي وَرَضِيْتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا

Terjemahnya:

Pada hari ini telah Aku sempurnakan agamamu untukmu, telah Aku cukupkan nikmat-Ku bagimu, dan telah Aku ridai Islam sebagai agamamu.<sup>1</sup>

Di antara kesempurnaan Islam, seluruh tujuan dari pensyariatannya adalah untuk menjaga kemaslahatan, sebagaimana firman Allah Swt. dalam Q.S al-Anbiyā'/21: 107:

وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ<sup>2</sup>

Terjemahnya:

Dan Kami tidak mengutus engkau (Muhammad) melainkan untuk (menjadi) rahmat bagi seluruh alam.

Tujuan syariat dalam menjaga kemaslahatan yang paling mendasar demi keberlangsungan hidup manusia harus terwujud. Sebab jika tidak, maka dapat menyebabkan ketidakseimbangan kehidupan di dunia yang akan berimbas pada

<sup>1</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Jakarta: Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019 M), h. 107.

<sup>2</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 331.

kemaslahatan kehidupan di akhirat. Inilah yang disebut dengan *al-Maqāṣid al-Darūriyyāt*.<sup>3</sup>

Para ulama telah mengisyaratkan hal tersebut, bahwa tujuan dari pensyariaan dalam Islam adalah untuk menjaga kemaslahatan manusia. Berkata *al-Syātibī*:

وَجَمْعُ الضَّرُورِيَّاتِ خَمْسَةٌ، وَهِيَ: حِفْظُ الدِّينِ، وَالنَّفْسِ، وَالنَّسْلِ، وَالْمَالِ، وَالْعَقْلِ<sup>4</sup>

Artinya:

Kebutuhan pokok (manusia) terdiri atas lima perkara, yaitu: menjaga agama, jiwa, keturunan, harta, dan akal.

*Al-Syātibī* menjelaskan makna "*al-Darūriyyāt*" ialah bahwa ia harus ada demi tegaknya kemaslahatan agama dan dunia. Jika perkara ini hilang, maka kemaslahatan dunia tidak akan berjalan dengan baik bahkan akan rusak, terjadi kekacauan dan hilangnya kehidupan. Sedangkan di akhirat, hilangnya perkara ini menyebabkan kehilangan keselamatan dan kenikmatan, serta kembali dengan kerugian yang nyata.<sup>5</sup>

Allah Swt. telah menerangkan di dalam Al-Qur'an bahwa untuk meraih seluruh kemaslahatan tersebut adalah dengan mengikuti petunjuk-Nya, Allah Swt. berfirman dalam Q.S Tāhā/20: 123:

فَمَنْ اتَّبَعَ هُدَايَ فَلَا يَضِلُّ وَلَا يَشْقَى

Terjemahnya:

Maka barangsiapa mengikuti petunjuk-Ku, dia tidak akan sesat dan tidak akan celaka.<sup>6</sup>

Demikian Allah telah menjamin siapa yang mengikuti petunjuk-Nya maka dia tidak akan celaka, tidak pada dunianya (jiwa, keturunan, harta, akal) dan tidak pula pada akhiratnya (agama).

Nabi saw. juga bersabda:

تَرَكْتُ فِيكُمْ أَمْرَيْنِ، لَنْ تَضِلُّوا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا: كِتَابَ اللَّهِ، وَسُنَّةَ نَبِيِّهِ<sup>7</sup>

Artinya:

Aku tinggalkan pada kalian dua perkara, kalian tidak akan pernah tersesat selama berpegang kepada keduanya: yaitu Al-Qur'an dan sunah.

Kendati demikian, terdapat sejumlah persoalan yang tidak dijelaskan secara eksplisit hukumnya dalam Al-Qur'an maupun Hadis, sehingga memunculkan penggunaan pendekatan seperti konsep *maṣlaḥah mursalah* dalam penetapan hukum. *Maṣlaḥah mursalah* sebagaimana disebutkan oleh Muhammad Husein al-Jizānī adalah:

<sup>3</sup>Sirajuddin, Kasjim Salenda, Abdul Wahid Haddade, "Peniadaan Shalat Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur SULSEL Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi COVID-19 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī'ah*", *Nukhbatul 'Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020): h. 297.

<sup>4</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2 (Cet. I; Mesir: Dār Ibnū 'Affān, 1417 H/1997 M), h. 20.

<sup>5</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā al-Syātibī, *Al-Muwāfaqāt*, Juz 2, h. 17-18.

<sup>6</sup>Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, h. 320.

<sup>7</sup>Mālik bin Anas, *Muwāṭṭa' al-Imām Mālik*, Juz 2 (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1412 H/1991 M), h. 70.

مَا لَمْ يَشْهَدِ الشَّرْعُ لِاعْتِبَارِهِ وَلَا لِإِلْغَائِهِ بِدَلِيلٍ خَاصٍّ<sup>8</sup>

Artinya:

Apa yang tidak disaksikan oleh syariat untuk dianggap (diakui) atau untuk dibatalkan (diabaikan) dengan dalil khusus.

Walaupun pada dasarnya *maṣlaḥah mursalah* adalah dalil yang diperselisihkan penerapannya oleh para ulama.<sup>9</sup> Namun, dengan melihat banyaknya hal-hal baru yang belum pernah terjadi sebelumnya menjadikan *maṣlaḥah mursalah* memiliki peran penting dalam menetapkan hukum yang tidak disebutkan secara eksplisit di dalam Al-Qur'an maupun Hadis.

Dalam tradisi keislaman, penanda makam merupakan praktik yang umum dijumpai di masyarakat Muslim yaitu berupa penulisan nama pada batu nisan. Meskipun terlihat sederhana, praktik ini menimbulkan perbedaan pendapat di kalangan ulama. Sebagian ulama melarangnya karena dianggap tidak sesuai dengan ajaran Rasulullah saw., serta dikhawatirkan menjerumuskan kepada sikap berlebihan dalam menghormati orang yang telah wafat. Namun, sebagian ulama lainnya membolehkan penulisan nama pada batu nisan dengan pertimbangan kemaslahatan, seperti untuk memudahkan identifikasi makam, serta menghindari kekeliruan. Pandangan ini berpijak pada konsep *maṣlaḥah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak bertentangan dengan nas.

Melihat adanya perbedaan pandangan tersebut, penelitian ini penting dilakukan untuk mengkaji lebih dalam bagaimana hukum penulisan nama pada batu nisan dipahami dari sudut pandang fikih, serta bagaimana konsep kemaslahatan dapat dijadikan dasar pertimbangannya.

Adapun hadis yang secara eksplisit melarangnya sebagaimana yang diriwayatkan oleh *Abū Dāwud* dari *Jābir* ra. bahwa ia mendengar Rasulullah saw. bersabda:

نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُجِصَّصَ وَيُنَيَّ عَلَيْهِ أَوْ أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ<sup>10</sup>

Artinya:

(Rasulullah saw.) melarang duduk di atas kuburan, mengapurinya, dan membangunnya, ataupun menuliskannya.

Akan tetapi, tambahan lafaz “أَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ” diperselisihkan kesahihannya. Di antara yang melemahkannya adalah *Ibnu al-Mulaqqin*<sup>11</sup> dan *Jamāluddīn al-Mizzī*.<sup>12</sup>

Inilah yang menjadi inti pembahasan karena sebagian ulama melemahkan hadisnya sehingga masyarakat menganggap penulisan nama pada batu nisan adalah hal

<sup>8</sup>Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jīzānī, *Ma'ālim Ushūl al-Fiqhī 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, (Cet. IX; Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427 H/2006 M), h. 236.

<sup>9</sup>Abdullah bin Yūsuf bin 'Isā bin Ya'qūb al-Judāī' al-'Anazī, *Taisir 'Ilmu Uṣul al-Fiqhī*, (Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M), h. 199.

<sup>10</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz 3 (Beirut: Maktabah al-'Aṣriyah, 1422 H/2002 M), h. 216.

<sup>11</sup>Ibnu al-Mulaqqin Sirājuddīn Abū Ḥafṣ 'Umar bin 'Alī bin Ahmad al-Syāfi'ī al-Miṣrī, *Al-Badru al-Munīr fī Takhrij al-Aḥādīṣ wa al-Āsār al-Wāqī'ah fī al-Syarh al-Kabīr*, Juz. 5 (Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa al-Tauzī', 1425 H/2004 M), h. 322.

<sup>12</sup>Jamāluddīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf bin al-Zakī 'Abdirrahmān bin Yūsuf al-Mizzī, *Tuḥfah al-Asyrāf bi Ma'rīfah al-Aṭrāf*, Juz. 2 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M), h. 186.

yang diperbolehkan dan masuk dalam ranah *maṣlaḥah mursalah* karena lemahnya dalil tersebut membuat sebagian masyarakat tidak menganggapnya sebagai suatu larangan.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian mengenai konsep *maṣlaḥah mursalah* dan hukum terkait penulisan nama pada batu nisan, serta analisis terhadap relevansi konsep *maṣlaḥah mursalah* dengan praktik penulisan nama pada batu nisan menjadi topik yang menarik untuk dikaji lebih lanjut serta untuk mengetahui perbedaan pendapat ulama terkait permasalahan tersebut.

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif yang menggunakan metode kajian pustaka (*library research*) yaitu suatu penelusuran dan penelitian kepustakaan dengan membaca berbagai buku, jurnal, dan publikasi pustaka lain yang berkaitan dengan topik penelitian, untuk menghasilkan satu tulisan berkenaan dengan satu topik atau isu tertentu.<sup>13</sup> Sumber data terdiri dari Al-Qur'an, hadis, buku dan artikel ilmiah. Data yang digunakan adalah data kualitatif, yaitu data utama yang diambil dari sumber data tertulis.<sup>14</sup> Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan normatif yaitu pendekatan yang berkaitan dengan boleh atau tidaknya suatu perkara, karena dalam pengkajiannya berhubungan dengan aspek legal-formal serta mengkaji ajaran Islam langsung dari sumber-sumbernya.<sup>15</sup> Didukung dengan pendekatan komparatif yaitu pendekatan yang digunakan untuk membandingkan dua kelompok atau lebih dari suatu variabel atau beberapa variabel sekaligus<sup>16</sup> yang juga didukung dengan pendekatan konseptual yaitu pendekatan yang digunakan untuk memberikan informasi atau pemahaman terkait konsep atau kaidah yang terdapat pada penelitian<sup>17</sup> sehingga bisa mengetahui secara lebih mendalam mengenai topik yang berkaitan dengan penelitian.

Beberapa penelitian terdahulu telah mengkaji terkait pemakaman Islam termasuk ukiran pada nisan, di antaranya adalah Jurnal *Komunikasi Kultural Islam dan Budaya*<sup>18</sup> yang ditulis oleh M. Alfin Fatikh dan Wahyu Hendrik pada tahun 2022 dan Jurnal *Akulturası Islam dan Budaya Dalam Prosesı Pemakaman*<sup>19</sup> yang ditulis oleh Azzahra, Mawarni dan Ainun Wardatul Hasanah pada tahun 2023. Keduanya membahas tentang interaksi antara Islam dan budaya lokal, terutama terkait dengan pemakaman dalam kompleks makam Islam. Dalam penelitian tersebut, diungkapkan adanya bentuk komunikasi budaya yang tercermin melalui arsitektur makam Islam. Hasil penelitian

---

<sup>13</sup>Marinu Waruwu, "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)", *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023): h. 2897.

<sup>14</sup>Ahmad Rijali, "Analisis Data Kualitatif", *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018): h. 86.

<sup>15</sup>Parid Sidik, "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam", *Al-Syar'i: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023): h. 1013.

<sup>16</sup>Zihnil Afif, Devi Syukri Azhari, Martin Kustati dan Nana Sepriyanti, "Penelitian Ilmiah (Kuantitatif) Beserta Paradigma, Pendekatan, Asumsi Dasar, Karakteristik, Metode Analisis Data Dan Outputnya", *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023): h. 689.

<sup>17</sup>Hepy Kusuma Astuti, "Penanaman Nilai-Nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah dalam Membentuk Karakter Religius", *Mumtaz: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022): h. 63.

<sup>18</sup>M. Alfin Fatikh and Wahyu Hendrik, "Komunikasi Kultural Islam dan Budaya", *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (2022).

<sup>19</sup>Azzahra, Mawarni, and Ainun Wardatul Hasanah, "Akulturası Islam Dan Budaya Dalam Prosesı Pemakaman", *Sospendis: Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2023).

tersebut memberikan gambaran mengenai adanya keragaman praktik keagamaan dan budaya dalam konteks pemakaman muslim di Indonesia.

Meskipun penelitian tersebut telah membahas pemakaman muslim termasuk bentuk nisan dan ukiran pada nisan, namun kajian tersebut tidak membahas terkait hukum tulisan yang terdapat pada batu nisan tersebut. Adapun penelitian ini akan membahas hukum penulisan nama pada batu nisan beserta pendapat para ulama terkait persoalan tersebut serta menganalisis relevansinya dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Penelitian ini bertujuan memperkaya khazanah fikih dengan mengkaji secara mendalam hukum penulisan nama pada batu nisan melalui pendekatan *maṣlaḥah mursalah*. Diharapkan, hasil kajian ini dapat menjadi rujukan ilmiah yang menjawab keraguan umat, serta mendorong penerapan hukum yang berlandaskan pada nilai kemaslahatan dan prinsip-prinsip syariat.

## PEMBAHASAN

### Konsep *Maṣlaḥah Mursalah*

#### 1) Pengertian *Maṣlaḥah Mursalah*

Secara bahasa *al-maṣlaḥah* (المصلحة) bermakna <sup>20</sup> *al-ṣalāḥ* (الصلاح) yang artinya kebaikan, lawan dari kata *al-fasād* (الفساد) yang artinya kerusakan. Secara istilah *al-maṣlaḥah* (*al-maṣlaḥah*) adalah:

المِحَافَظَةُ عَلَى مَقْصُودِ الشَّرْعِ، وَمَقْصُودِ الشَّرْعِ مِنَ الْخَلْقِ خَمْسَةٌ، وَهُوَ أَنْ يُحَافِظَ عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ، وَنَفْسَهُمْ، وَعَقْلَهُمْ، وَنَسْلَهُمْ، وَمَالَهُمْ<sup>21</sup>

Artinya:

Penjagaan terhadap tujuan syariat, dan tujuan syariat pada makhluk (manusia) ada lima, yaitu: penjagaan terhadap agamanya, jiwanya, akalannya, keturunannya, dan hartanya.

Adapun kata *mursalah* (مرسلة) berasal dari tiga rangkaian huruf, yaitu ل ر س yang secara bahasa kata (الرَّسَل) bermakna:<sup>22</sup> "القَطِيعِ مِنْ كُلِّ شَيْءٍ" atau terputus dari segala sesuatu. Sedangkan secara istilah *al-mursalah* (المرسلة) adalah:

الَّتِي لَمْ يُقَيِّدْهَا الشَّارِعُ بِاعْتِبَارٍ وَلَا بِالْعَاءِ<sup>23</sup>

Artinya:

<sup>20</sup>Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamaluddin Ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz. 2 (Cet. III; Beirut: Dār Ṣādr, 1414 H/1994 M), h. 517.

<sup>21</sup>Abū Hāmid Muhammad bin Muhammad al-Gazālī, *Al-Mustaṣfā*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyah, 1413 H/1993 M), h. 174.

<sup>22</sup>Muhammad bin Mukrim bin 'Alī Abū al-Faḍl Jamaluddin Ibnu Manẓūr, *Lisānu al-'Arab*, Juz. 11, h. 281.

<sup>23</sup>'Abdul Karīm bin 'Alī bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqhi al-Muqāran*, Juz. 3 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rasyd, 1420 H/1999 M), h. 1003.

Yang tidak terikat dengan syariat pada penetapannya dan tidak pula pada pengingkarannya.

Maka secara istilah *maṣlaḥah mursalah* adalah:

كُلُّ مَنْفَعَةٍ دَاخِلَةٍ فِي مَقَاصِدِ الشَّارِعِ الْخَمْسَةِ دُونَ أَنْ يَكُونَ لَهَا شَاهِدٌ بِالِاعْتِبَارِ أَوْ الْإِلْغَاءِ<sup>24</sup>

Artinya:

Setiap manfaat yang termasuk dalam tujuan syariat yang lima, tanpa adanya dalil yang menunjukkan bahwa ia diakui atau ditolak.

Secara definitif dapat dipahami bahwa *maṣlaḥah mursalah* merupakan sebuah metode *istinbāt* hukum (*legal theory*) yang didasarkan kepada kemaslahatan yang tidak mendapat legalitas khusus dari *nash* tentang validitasnya dan tidak terdapat pula dalil yang secara tegas dan jelas menyatakan ketidakvaliditasannya.<sup>25</sup> Dapat ditarik kesimpulan tentang hakikat *maṣlaḥah mursalah* yaitu sesuatu yang baik menurut akal dengan pertimbangan dapat mewujudkan kebaikan dan menghindarkan keburukan bagi manusia, dimana apa yang baik menurut akal tersebut selaras dengan tujuan syariat dan tidak ditemukan petunjuknya secara khusus baik berupa pengakuannya maupun penolakannya.<sup>26</sup>

## 2) Kehujahan *Maṣlaḥah Mursalah*

Para ulama berbeda pendapat terkait kehujahan *maṣlaḥah mursalah* menjadi tiga pendapat:

1. Membolehkan secara mutlak. Ini adalah pendapat Malik<sup>27</sup> dan *al-Ṭūfy*.<sup>28</sup>
2. Melarang secara mutlak. Ini adalah pendapat mayoritas *Uṣūliyyīn*<sup>29</sup>, *Syafii*<sup>30</sup>, *al-Āmidy*<sup>31</sup>, *ibnu Ḥājib*<sup>32</sup>, *ibnu Qudāmah*<sup>33</sup>.

<sup>24</sup>Abdul Karīm bin 'Alī bin Muhammad al-Namlah, *Al-Muḥaẓẓab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqhi al-Muqāran*, Juz. 3, h. 1003.

<sup>25</sup>Mohammad Rusfi, "Validitas *Maṣlaḥah Mursalah* Sebagai Sumber Hukum", *Al-'Adalah* 12, no. 1 (2014): h. 66.

<sup>26</sup>Ahmad Qorib and Isnaini Harahap, "Penerapan *Maṣlaḥah Mursalah* dalam Ekonomi Islam", *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016): h. 58.

<sup>27</sup>'Alī bin 'Abdu al-Kāfī al-Subkī, *Al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj*, Juz. 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1404 H/1984 M), h. 178.

<sup>28</sup>Muhammad Ṣāliḥ Muhammad al-Itrabī, *Al-Turūk al-Nubuwwah Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan*, Juz. 1 (Cet. I; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1433 H/2012 M), h. 395.

<sup>29</sup>Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz. 2 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/1999 M), h. 184.

<sup>30</sup>Abū 'Abdillāh Badruddīn Muhammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣul al-Fiqh*, Juz. 8 (Cet. I; Mesir: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M), h. 83.

<sup>31</sup>Sayfuddīn Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad al-Āmidī, *Al-Iḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*, Juz. 4 (Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1402 H/1982 M), h. 160.

<sup>32</sup>Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Tahqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz. 2, h. 134.

<sup>33</sup>Muwaffaquddīn 'Ābduḥ al-Ḥamad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nazir wa Junnah al-Munāẓir*, Juz. 1 (Cet. II; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M), h. 482.

3. Membolehkan dengan syarat. Ini adalah pendapat Syafii<sup>34</sup> (riwayat lain), *al-Ghazāly*<sup>35</sup>, *al-Syātibī*.<sup>36</sup>

Permasalahan ini memiliki pembicaraan dan perselisihan yang sangat panjang<sup>37</sup>, sebagian ulama mengingkari penisbatan pendapat pada mazhabnya dan sebagian lain menetapkan mazhab lain pada pendapat mazhabnya.<sup>38</sup>

Ringkasnya, tidak sedikit ulama yang menukil pendapat jumhur pada yang membolehkannya (*maṣlaḥah mursalah*) bahwa itu bukan hanya pendapat dalam mazhab Malik. Di antaranya:

1. Berkata *al-Qarāfī*:

يُحْكِي أَنَّ الْمَصْلَحَةَ الْمُرْسَلَةَ مِنْ حَصَائِصِ مَذْهَبِ مَالِكٍ.  
وَلَيْسَ كَذَلِكَ، بَلِ الْمَذَاهِبُ كُلُّهَا مُشْتَرِكَةٌ فِيهَا؛ فَإِنَّهُمْ يُعَلِّقُونَ، وَيُفَرِّقُونَ فِي صَوْرِ التَّقْوِصِ،  
وَعَيْرِهَا، وَلَا يُطَالِيُونَ أَنْفُسَهُمْ بِأَصْلِ يَشْهَدُ لِذَلِكَ الْفَارِقِ بِالِاعْتِبَارِ، بَلِ يَعْتَمِدُونَ عَلَى مُجَرَّدِ  
الْمُنَاسَبَةِ، وَهَذَا هُوَ عَيْنُ الْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ<sup>39</sup>

Artinya:

Dikisahkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* adalah salah satu ciri khas mazhab Malik. Namun tidaklah demikian, melainkan semua mazhab ikut serta dalam hal ini. Sebab mereka mengaitkan dan membedakan dalam berbagai kasus pembatalan hukum dan lainnya, tanpa menuntut adanya dasar yang secara eksplisit menjadi saksi atas perbedaan tersebut melalui *i'tibār* (pertimbangan). Sebaliknya, mereka hanya bergantung pada *munāsabah* (kesesuaian semata), dan inilah hakikat dari *maṣlaḥah mursalah*.

2. Berkata *al-Zarkasyī*:

وَالْمَشْهُورُ اخْتِصَاصُ الْمَالِكِيَّةِ بِهَا وَلَيْسَ كَذَلِكَ، فَإِنَّ الْعُلَمَاءَ فِي جَمِيعِ الْمَذَاهِبِ يَكْتَفُونَ بِمُطْلَقِ  
الْمُنَاسَبَةِ، وَلَا مَعْنَى لِلْمَصْلَحَةِ الْمُرْسَلَةِ إِلَّا ذَلِكَ<sup>40</sup>

Artinya:

Yang masyhur adalah bahwa *maṣlaḥah mursalah* khusus bagi mazhab Maliki, namun kenyataannya tidak demikian. Sebab para ulama di semua mazhab merasa cukup dengan sekadar *munāsabah* (kesesuaian), dan tidak ada makna bagi *maṣlaḥah mursalah* kecuali hal itu.

<sup>34</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-I'tisām*, Juz. 2 (Cet. I; Saudi: Dār Ibnu 'Affān, 1412 H/1992 M), h. 608

<sup>35</sup>Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad al-Ghazālī, *Al-Mustaṣfā*, (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1413 H/1993 M), h. 173.

<sup>36</sup>Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī al-Syātibī, *Al-I'tisām*, Juz. 2, h. 612.

<sup>37</sup>Muhammad Ṣāliḥ Muhammad al-Itrabī, *Al-Turūk al-Nubuwwah Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan*, Juz. 1, h. 394.

<sup>38</sup>Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh al-Syaukānī, *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*, Juz. 2, h. 184.

<sup>39</sup>Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs al-Qarāfī, *Nafā'is al-Uṣūl fī Syarḥ al-Maḥṣūl*, Juz. 9 (Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, 1416 H/1995 M), h. 4095.

<sup>40</sup>Abū 'Abdillāh Badruddīn Muhammad bin 'Abdillāh al-Zarkasyī, *Al-Baḥr al-Muḥīṭ fī Uṣul al-Fiqh*, Juz. 7, h. 275.

3. Berkata Sya'bān Muhammad Ismā'il dalam komentarnya terhadap ucapan *Ibnu Qudāmah* dalam *Rauḍah al-Nāzir* yang mengatakan bahwa *maṣlaḥah mursalah* bukan hujah:

الْوَاقِعُ أَنَّ هَذَا لَيْسَ مَذْهَبَ الْإِمَامِ مَالِكٍ وَبَعْضِ الشَّافِعِيِّ، كَمَا قَالَ الْمُصَنِّفُ، وَلَكِنَّهُ رَأْيُ جُمْهُورِ الْعُلَمَاءِ، وَمِنْهُمْ الْإِمَامُ الشَّافِعِيُّ فِي الْقَدِيمِ، وَبَعْضُ الْحَنَفِيِّ، كَمَا أَنَّهُ مَرْوِيٌّ عَنِ الْإِمَامِ أَحْمَدَ وَكَثِيرٍ مِنَ الْحَنَابِلَةِ، غَيْرَ أَنَّ الْإِمَامَ مَالِكًا -رَحِمَهُ اللَّهُ تَعَالَى- تَوَسَّعَ فِي الْأَخْذِ بِالْمَصَالِحِ الْمُرْسَلَةِ أَكْثَرَ مِنْ غَيْرِهِ، وَيَلِيهِ فِي الْأَخْذِ بِهَا الْحَنَابِلَةُ<sup>41</sup>

Artinya:

Pada kenyataannya, ini bukan hanya mazhab Imam Malik dan sebagian ulama Syafiiyah, sebagaimana yang dikatakan oleh penulis. Namun ini adalah pendapat mayoritas ulama, termasuk Imam Syafii dalam pendapat lamanya, serta sebagian ulama Hanafiyah. Selain itu juga diriwayatkan dari Imam Ahmad dan banyak ulama Hanabilah. Hanya saja, Imam Malik -*rahimahullāh*- lebih luas dalam penerapan *maṣlaḥah mursalah* dibandingkan yang lainnya, diikuti oleh ulama Hanabilah dalam penggunaannya.

Berdasarkan hasil kajian, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* memang diperselisihkan sebagai salah satu metode istinbat hukum, akan tetapi tidak pada penerapannya. Ini terlihat dari pendapat para ulama yang menolaknya sebagai hujah akan tetapi pada dasarnya mereka menerapkannya dalam berbagai hal. Ini merupakan landasan hukum yang sah dalam kerangka *istinbāṭ* fikih, khususnya untuk menjawab persoalan yang tidak diatur secara eksplisit dalam Al-Qur'an maupun Hadis. Keabsahan konsep ini bertumpu pada prinsip dasar syariat, yaitu mewujudkan kemaslahatan dan mencegah kemudaratannya, selama penerapannya tidak bertentangan dengan nas yang *qaṭ'ī* serta tetap sejalan dengan *maqāṣid al-syarī'ah*. Dengan demikian, *maṣlaḥah mursalah* menjadi instrumen penting dalam menjawab problematika hukum kontemporer secara rasional, relevan, dan tetap berakar pada nilai-nilai syariat.

### 3) Pembagian *Maṣlaḥah Mursalah*

Pada asalnya maslahat terbagi menjadi tiga, yaitu: *maṣlaḥah mu'tabarāh syar'ān*, *maṣlaḥah mulghāh syar'ān*, *maṣlaḥah maskūt 'anhā*.<sup>42</sup>

1. *Maṣlaḥah mu'tabarāh syar'ān* adalah maslahat *syar'i* (kepentingan yang diakui dalam syariat) yang didukung oleh dalil-dalil syariat dari Al-Qur'an, atau Sunah, atau *Ijmā'* (kesepakatan ulama), atau *Qiyās* (analogi). Contohnya seperti salat.
2. *Maṣlaḥah mulghāh syar'ān* adalah maslahat yang dianggap oleh seorang hamba (dengan pandangannya yang terbatas) sebagai maslahat, namun syariat membatalkannya dan mengabaikannya, serta tidak memperhatikannya. Bahkan, dalil-dalil syariat datang untuk melarangnya dan mengharamkannya, baik dari Al-

<sup>41</sup>Muwaffaquddīn 'Abdullāh bin Aḥmad bin Qudāmah al-Maqdisī, *Rauḍah al-Nāzir wa Junnah al-Munāzir*, Juz. 1, h. 482.

<sup>42</sup>Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jīzānī, *Ma'ālim Ushūl al-Fiqhī 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 235.

Qur'an, Sunah, *Ijmā'*, atau *Qiyās*. Contohnya adalah masalah yang dianggap ada dalam khamar (minuman keras).

3. *Maṣlaḥah maskūt 'anhā* adalah masalah yang tidak terdapat dalil khusus dari Al-Qur'an, Sunah, *Ijmā'*, atau *Qiyās* yang menetapkannya atau membatalkannya. Namun, masalah ini tidak lepas dari adanya dalil umum yang bersifat menyeluruh yang menunjukkan keberadaannya. Oleh karena itu, masalah ini tidak bersandar pada dalil khusus tertentu, melainkan bersandar pada *maqāsid syari'ah* (tujuan-tujuan syariat) dan keumumannya. Masalah semacam ini disebut dengan *maṣlaḥah mursalah*.

Adapun *maṣlaḥah mursalah* terbagi menjadi tiga, yaitu: *maṣlaḥah dhorūriyah*, *maṣlaḥah ḥājīyah*, *maṣlaḥah taḥsīniyah*.<sup>43</sup>

1. *Maṣlaḥah dhorūriyah (dar'u al-mafāsīd)* adalah masalah yang berada pada tingkat kebutuhan mendesak (darurat), sehingga jika masalah ini tidak terpenuhi, akan menyebabkan hilangnya sebagian atau seluruh kebutuhan pokok (agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta). Masalah ini merupakan tingkat masalah yang paling tinggi. Contohnya adalah pengharaman pembunuhan dan kewajiban *qisās* (hukuman balasan sepadan).
2. *Maṣlaḥah ḥājīyah (jalbu al-maṣālih)* adalah masalah yang berada pada tingkat kebutuhan (hajat), bukan darurat. Memenuhi masalah ini akan memberikan kemudahan dan mendatangkan manfaat. Namun, jika masalah ini tidak terpenuhi, tidak akan mengakibatkan hilangnya kebutuhan pokok. Contohnya adalah akad sewa-menyewa (*ijārah*) dan kerja sama pengelolaan pertanian (*musāqah*).
3. *Maṣlaḥah taḥsīniyah (tatmīmāt)* adalah masalah yang bukan termasuk kebutuhan mendesak (darurat) ataupun kebutuhan (hajat), melainkan termasuk dalam kategori menjaga akhlak mulia dan mengikuti metode terbaik dalam kehidupan. Contohnya adalah pengharaman najis.

## Hukum dan Perbedaan Pendapat terkait Penulisan Nama pada Batu Nisan

### 1. Pendapat Mazhab Hanafi

Berkata *al-Kāsānī*:

وَكْرَهُ أَبُو حَنِيفَةَ الْبِنَاءَ عَلَى الْقَبْرِ وَأَنْ يُعَلَّمَ بِعَلَامَةٍ، وَكَرِهَ أَبُو يُوسُفَ الْكِتَابَةَ عَلَيْهِ. لِمَا رُوِيَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنَّهُ قَالَ: لَا تُحْصِصُوا الْقُبُورَ وَلَا تَبْنُوا عَلَيْهَا وَلَا تَفْعُدُوا وَلَا تَكْتُبُوا عَلَيْهَا، وَلَا أَنْ ذَلِكَ مِنْ بَابِ الزَّيْنَةِ<sup>44</sup>

Artinya:

*Abū Hanīfah* memakruhkan pembangunan di atas kubur dan menandainya dengan tanda tertentu, dan *Abū Yūsuf* memakruhkan adanya tulisan di atasnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan dari Jabir bin Abdullah dari Nabi saw., bahwa

<sup>43</sup>Muhammad bin Husain bin Hasan al-Jīzānī, *Ma'ālim Ushūl al-Fiqhi 'Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā'ah*, h. 237.

<sup>44</sup>'Alāuddīn Abū Bakr bin Mas'ūd al-Kāsānī, *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*, Juz. 1 (Cet. I; Beirut Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1327 H/1926 M), h. 320.

beliau bersabda: “Janganlah kalian mengapur kuburan, jangan membangun di atasnya, jangan duduk di atasnya, dan jangan menulis di atasnya, karena semua itu termaksud dalam bentuk perhiasan (hiasan duniawi)”.

## 2. Pendapat Mazhab Maliki

Berkata *al-'Alaisyi*:

(وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ) (كَحَجَرٍ) (بِلَا نَقْشٍ) لِاسْمِهِ أَوْ تَارِيخِ مَوْتِهِ عَلَى الْحَجَرِ أَوْ الْخَشْبَةِ، وَإِلَّا كُرِهَ<sup>45</sup>

Artinya:

(Dan dibolehkan untuk membedakan) (seperti batu/nisan) (tanpa ukiran), untuk nama (mayit) atau tanggal wafatnya pada batu atau kayu, jika tidak maka makruh.

Maksud *al-'Alaisyi* adalah diperbolehkan memberi tanda pada makam berupa batu atau kayu sebagai pembeda tetapi tidak dengan mengukirnya, untuk menulis nama maupun tanggal wafatnya, karena hal tersebut dimakruhkan.

## 3. Pendapat Mazhab Syafii

Berkata *al-Nawawī*:

قَالَ الشَّافِعِيُّ وَالْأَصْحَابُ يُكْرَهُ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ اسْمُ صَاحِبِهِ أَوْ غَيْرُ ذَلِكَ وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ وَهَذَا لَا خِلَافَ فِيهِ عِنْدَنَا<sup>46</sup>

لِمَا رَوَى جَابِرٌ قَالَ: "نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ، أَوْ يُبْنَى عَلَيْهِ، أَوْ يُعْقَدَ، أَوْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ"، وَلَئِنَّ ذَلِكَ مِنَ الزَّيْنَةِ<sup>47</sup>

Artinya:

Syafii dan para pengikutnya berpendapat bahwa dimakruhkan untuk mengapuri kubur, menuliskan nama pemiliknya atau hal lain di atasnya, serta membangun sesuatu di atasnya. Dalam hal ini, tidak ada perbedaan pendapat di kalangan kami.

Dari apa yang diriwayatkan oleh Jabir, ia berkata: “Rasulullah saw. melarang mengapur kubur, membangun di atasnya, duduk di atasnya, atau menulisnya”, karena semua itu termasuk bentuk perhiasan (hiasan duniawi).

## 4. Pendapat Mazhab Hambali

Berkata *Ibnu Qudāmah*:

<sup>45</sup>Muhammad bin Ahmad bin Muhammad al-'Alaisyi, *Manḥu al-Jalīl Syarḥu Mukhtaṣar Khalīl*, Juz. 1 (Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M), h. 517.

<sup>46</sup>Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, Juz. 5 (Kairo: Idarotu al-Thiba'ah al-Muniriyah, 1344 H/1926 M), h. 298.

<sup>47</sup>Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā bin Syaraf al-Nawawī, *Al-Majmū' Syarhu al-Muḥaẓẓab*, Juz. 5 (Kairo: Idarotu al-Thiba'ah al-Muniriyah, 1344 H/1926 M), h. 296.

وَيُكْرَهُ الْبِنَاءُ عَلَى الْقَبْرِ، وَتَجْصِصُهُ، وَالْكِتَابَةُ عَلَيْهِ. لِمَا رَوَى مُسْلِمٌ فِي صَحِيحِهِ " قَالَ: نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَنْ يُجْصَّصَ الْقَبْرُ، وَأَنْ يُبْنَى عَلَيْهِ، وَأَنْ يُفْعَدَ عَلَيْهِ. زَادَ التِّرْمِذِيُّ وَأَنْ يُكْتَبَ عَلَيْهِ<sup>48</sup>

Artinya:

Dimakruhkan membangun di atas kubur, mengapurinya, dan menuliskan sesuatu di atasnya. Berdasarkan apa yang diriwayatkan oleh Muslim dalam *Ṣaḥīḥ*-nya, beliau berkata: "Rasulullah saw. melarang mengapur kuburan, membangun di atasnya, dan duduk di atasnya". Tambahan dalam Riwayat *al-Tirmizī*: "dan menulis di atasnya".

#### 5. Pendapat Mazhab *Zāhiri*

Berkata *Ibnu Ḥazm*:

وَلَا يَجِلُّ أَنْ يُبْنَى الْقَبْرُ، وَلَا أَنْ يُجْصَّصَ، وَلَا أَنْ يُزَادَ عَلَى تَرَابِهِ شَيْءٌ، وَيُيْهَدَمُ كُلُّ ذَلِكَ، فَإِنْ بُنِيَ عَلَيْهِ بَيْتٌ أَوْ قَائِمٌ: لَمْ يَكْرَهُ ذَلِكَ. وَكَذَلِكَ لَوْ نَقَشَ اسْمُهُ فِي حَجَرٍ: لَمْ نَكْرَهُ<sup>49</sup>

Artinya:

Tidak diperbolehkan membangun kubur, mengapurinya, atau menambahkan sesuatu di atas tanahnya, semua itu harus dihancurkan. Namun jika di atasnya didirikan rumah atau tiang, hal itu tidak dimakruhkan. Demikian pula, jika nama si mayit diukir pada batu, kami tidak memakruhkannya.

*Ibnu Ḥazm* dalam kitabnya "*al-Muḥallā bi al-Āṣār*" hanya membawakan riwayat Muslim dan tidak membawakan riwayat lainnya yang menyertakan larangan menulis kuburan, sehingga beliau tidak menganggapnya sebagai suatu hal yg terlarang.

#### 6. Fatwa *al-Lajnah al-Dāimah*

تُحْرَمُ الْكِتَابَةُ عَلَى الْقُبُورِ مُطْلَقًا وَلَوْ غَيْرَ الْقُرْآنِ؛ لِعُمُومِ نَهْيِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنِ الْكِتَابَةِ عَلَيْهِ<sup>50</sup>

Artinya:

Diharamkan menulis apapun di kuburan sekalipun bukan dari Al-Qur'an, karena adanya larangan umum dari Nab saw. terhadap penulisan di atasnya (kuburan).

#### 7. Fatwa *Dār al-Iftā' al-Miṣriyah*

<sup>48</sup>Muwaffaquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad Ibnu Qudāmah, *Al-Mugnī*, Juz. 2 (Cet. I; Mesir: Maktabah al-Qāhīroh, 1388 H/1968 M), h. 378.

<sup>49</sup>Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'īd bin Ḥazm, *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*, Juz. 3 (Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1408 H/1988 M), h. 356.

<sup>50</sup>Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā', *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah al-Majmū'ah al-Ūlā*, Juz. 9 (Riyadh: Idārah al-'Āmmah li al-Ṭīb', 1390 H/1971 M), h. 106.

النَّهْيُ عَنِ الْكِتَابَةِ عَلَى الْقُبُورِ دُونَ تَفْرِيقَةِ بَيْنِ كِتَابَةِ إِسْمِ الْمَيِّتِ وَكِتَابَةِ غَيْرِهِ. وَكُلُّ ذَلِكَ يَعْتَمِدُ فِيهِ إِلَى حَدِّ كَبِيرٍ عَلَى النِّيَّةِ الْبَاعِثَةِ لِلْكِتَابَةِ، فَإِنْ كَانَتْ لِمَجَرِّدِ التَّعْرِفِ عَلَى صَاحِبِ الْقَبْرِ فَلَا بَأْسَ بِذَلِكَ مُطْلَقًا، وَإِنْ كَانَتْ الْكِتَابَةُ لِلْفَخْرِ وَالْمُبَاهَاةِ فَهِيَ مَذْمُومَةٌ قَطْعًا<sup>51</sup>

Artinya:

Larangan menulis di atas kuburan, tanpa membedakan antara menulis nama si mayit atau tulisan lainnya. Semua itu sangat bergantung pada niat yang mendasari penulisan tersebut, jika penulisan hanya untuk sekadar mengenali pemilik kuburan maka tidak mengapa sama sekali, namun jika penulisan tersebut dilakukan untuk tujuan kebanggaan dan pamer maka hal itu jelas tercela.

Dalam pembahasan ini, para ulama tidak hanya membatasi pada permasalahan penulisan nama saja, akan tetapi termaksud juga penulisan tanggal wafat pada nisan. Terlihat dari pendapat mereka yang sebagian menyatakan “makruh menulis nama pada nisan maupun menulis tanggal wafatnya” seperti pendapat *al-'Alaisyi*, juga sebagian lainnya menyatakan “makruh menulis apapun pada nisan seperti nama mayit ataupun tulisan lainnya” seperti pendapat *al-Nawawī*. Begitupun para ulama yang mengharamkan penulisan nama pada nisan juga mengharamkan penulisan tanggal wafat maupun yang lainnya, seperti pendapat *al-Lajnah al-Dāimah* dengan menyatakan “diharamkan menulis apapun pada kuburan walaupun bukan dari ayat-ayat Al-Qur'an”. Juga para ulama yang membolehkan dengan syarat (hajat) tidak terbatas pada penulisan nama akan tetapi penulisan lainnya jika diperlukan, seperti pendapat *Dār al-Iftā' al-Miṣriyah* dengan menyatakan “larangan penulisan pada kuburan tanpa membedakan antara menulis nama mayit ataupun tulisan lainnya, akan tetapi semua bergantung pada niat penulisan tersebut”.

### Analisis Praktik Penulisan Nama pada Batu Nisan terhadap *Maṣlaḥah Mursalah*.

Dengan meninjau pemaparan di atas mengenai *maṣlaḥah mursalah* dan hukum terkait penulisan nama pada batu nisan, maka terlihat jelas bahwa *maṣlaḥah mursalah* tidak relevan dengan praktik penulisan nama pada batu nisan. Istilah *mursalah* adalah sesuatu yang tidak ada keterangan eksplisit dari Al-Qur'an maupun hadis, sedangkan dalam masalah ini (penulisan nama pada batu nisan) telah ada hadis yang secara eksplisit melarangnya. Praktik ini lebih tepatnya masuk dalam *maṣlaḥah mulghāh* karena masyarakat menganggapnya sebagai suatu maslahat sedangkan syariat telah menerangkan larangannya. Berkata *al-Syinqīṭī* dalam syarahnya terhadap kitab *Zād al-Mustaqni'*:

فَقَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ) مُتَرَدِّدٌ بَيْنَ كَرَاهَةِ التَّحْرِيمِ وَكَرَاهَةِ التَّنْزِيهِ، وَالْأَكْثَرُ فِي تَعْبِيرَاتِ السَّلَفِ الصَّالِحِ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَيْهِمْ حَمْلُ الْكَرَاهَةِ عَلَى التَّحْرِيمِ، فَقَدْ بَجَدُ الْأَيْمَةَ كَالْإِمَامِ أَحْمَدَ وَمَالِكٍ رَحْمَةُ اللَّهِ عَلَى الْجَمِيعِ يَقُولُ: هَذَا شَيْءٌ أَكْرَهُهُ، وَمُرَادُهُ: أَنَّهُ حَرَامٌ، وَإِنَّمَا اتَّقَى وَيَتَّقِي كُلُّ مِنْهُمْ التَّعْبِيرَ بِالْحُرْمَةِ

<sup>51</sup>Dār al-Iftā' al-Miṣriyah, *Fatāwā Dār al-Iftā' al-Miṣriyah*, Juz. 8 (Mesir: 1895 M/1314 H) h. 278.

وَرَعًا وَخَوْفًا مِنَ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَىٰ مِنَ التَّصْرِیحِ بِالْحُرْمَةِ، فَيَقُولُ: أَكْرَهُهُ، فَعَبَّرَ رَحِمَهُ اللَّهُ بِكَرَاهِيَةِ  
الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ، وَالْكَرَاهَةُ تَحْرِيمِيَّةٌ.  
وَقَوْلُهُ: (وَيُكْرَهُ تَجْصِصُهُ) أَي: تَجْصِصُ الْقَبْرِ، وَهُوَ وَضْعُ الْجِصِّ فِيهِ، وَذَلِكَ يَكُونُ بِنَاءً دَاخِلِهِ،  
وَهَكَذَا يَكُونُ بِتَزْوِيقِهِ وَتَجْمِيلِهِ وَوَضْعِ الرُّخَامِ وَنَحْوِ ذَلِكَ فِي دَاخِلِ الْقَبْرِ، فَكُلُّ ذَلِكَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ  
تَحْرِيمٌ؛ لِأَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ نَهَىٰ عَنِ تَجْصِصِ الْقَبْرِ كَمَا ثَبَتَ فِي حَدِيثِ جَابِرٍ وَعَظِيْرِهِ،  
وَهَذَا النَّهْيُ الْأَصْلِيُّ أَنَّهُ لِلتَّحْرِيمِ حَتَّىٰ يَدُلَّ الدَّلِيلُ عَلَىٰ مَا دُونَ التَّحْرِيمِ وَهُوَ الْكَرَاهَةُ، وَلَا دَلِيلَ  
يَدُلُّ عَلَىٰ أَنَّهُ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَنْزِيْهِ، فَهُوَ مَكْرُوهٌ كَرَاهَةٌ تَحْرِيمِيَّةٌ<sup>52</sup>

Artinya:

Maka perkataan (dimakruhkan) di sini berada di antara makna makruh *tahrim* dan makruh *tanzih*. Namun dalam istilah salaf salih *rahimahumullāh*, kebanyakan penggunaan kata makruh merujuk kepada haram. Misalnya para imam seperti Imam Ahmad dan Imam Malik *rahimahumullāh* mengatakan: "Perkara ini saya memakruhkannya (membencinya)," tetapi yang dimaksud adalah haram. Mereka menghindari menyebutkan haram secara langsung sebagai bentuk kehati-hatian dan rasa takut kepada Allah, sehingga mereka memilih istilah makruh (tidak menyukai). Maka dalam hal ini, penggunaan istilah dimakruhkan untuk pembangunan di atas kubur sebenarnya bermakna makruh *tahrim*.

Dan perkataan (dimakruhkan memplester kubur), maksudnya adalah melapisi kubur dengan plester yang dilakukan dengan membangun bagian dalamnya, menghiasinya, atau menggunakan bahan seperti marmer di dalam kubur. Semua itu dimakruhkan dalam arti makruh *tahrim*, karena Nabi saw. melarang memplester kubur sebagaimana yang diriwayatkan dalam hadis *Jābir* dan yang lainnya. Larangan tersebut secara asal menunjukkan keharaman, kecuali ada dalil yang menunjukkan maknanya lebih ringan yaitu makruh (*tanzih*). Namun tidak ada dalil yang menunjukkan bahwa hal itu (larangan) hanya makruh *tanzih*. Maka hukumnya adalah makruh *tahrim*.

Di antara ulama yang berpendapat demikian (yakni haramnya penulisan nama pada batu nisan) adalah *Ibnu Bāz*, beliau berkata:

الْكِتَابَةُ عَلَى الْقُبُورِ مِنْهَا وَلَا يَحُوزُ؛ لِمَا يُحْشَىٰ فِي ذَلِكَ مِنَ الْفِتْنَةِ لِبَعْضِ مَنْ يُكْتَبُ عَلَى  
قَبْرِهِ<sup>53</sup>

Artinya:

<sup>52</sup>Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār al-Syinqīṭī, *Syarh Zād al-Mustaqni'*, Juz 86 (Al-Syabakah al-Islāmiyah: Durūs Šautiyah), h. 4.

<sup>53</sup>'Abdul 'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abdirrahmān bin Bāz, *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*, Juz. 13 (Saudi: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā'), h. 200.

Penulisan pada kuburan dilarang dan tidak diperbolehkan, karena dikhawatirkan hal itu dapat menimbulkan fitnah bagi sebagian orang yang dituliskan pada kuburnya.

Karena segala bentuk yang mengarah pada ke haraman maha hukumnya haram.

مَا يُفْضِي إِلَى الْحَرَامِ فَهُوَ حَرَامٌ<sup>54</sup>

Artinya:

Apa yang mengarah kepada yang haram, maka itu haram.

Ini selaras dengan pendapat sejumlah ulama yang mengharamkannya secara mutlak, di antaranya adalah *al-Syaukānī*<sup>55</sup>, *al-Sindī*<sup>56</sup>, *al-‘Irāqī*<sup>57</sup>, *al-Zahabī*<sup>58</sup> dan *Ibnu al-Hājī*.<sup>59</sup>

Kendati demikian, tidak dipungkri bahwa ada kemaslahatan (secara umum) terkait penulisan nama pada batu nisan di antaranya adalah sebagai pembeda antara satu kubur dengan kubur lainnya. Inilah yang diisyaratkan oleh para ulama di antaranya adalah *al-Albānī*:

هَذَا الْقِيَاسُ عَلَى إِطْلَاقِهِ بَعِيدٌ، وَالصَّوَابُ تَقْيِيدُهُ بِمَا إِذَا كَانَ الْحَجَرُ لَا يُحَقِّقُ الْعَايَةَ الَّتِي مِنْ أَجْلِهَا وَضَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْحَجَرَ، أَلَا وَهِيَ التَّعَرُّفُ عَلَيْهِ، وَذَلِكَ بِسَبَبِ كَثْرَةِ الْقُبُورِ مِثْلًا وَكَثْرَةِ الْأَحْجَارِ الْمُعَرَّفَةِ، فَحِينَئِذٍ يُجُوزُ كِتَابَةُ الْإِسْمِ بِقَدْرِ مَا تَتَحَقَّقُ بِهِ الْعَايَةُ الْمَذْكُورَةُ<sup>60</sup>

Artinya:

Analogi ini jika dibiarkan secara mutlak terlalu jauh, dan yang benar adalah membatasinya pada keadaan di mana batu tidak lagi mencapai tujuan yang karenanya Rasulullah saw. meletakkan batu (pada kubur ‘Usmān bin Maẓ’ūn), yaitu untuk mengenali kubur tersebut. Hal ini misalnya disebabkan oleh banyaknya kuburan dan banyaknya batu penanda. Maka pada kondisi seperti itu, diperbolehkan menulis nama pada batu secukupnya untuk memenuhi tujuan yang telah disebutkan.

<sup>54</sup>Muhammad Muṣṭafā al-Zuhailī, *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātuhā fī Maẓāhib al-Arba'ah*, Juz. 1 (Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M), h. 631.

<sup>55</sup>Muhammad bin ‘Alī bin Muhammad bin ‘Abdillāh al-Syaukānī, *Nail al-Auṭār*, Juz. 4 (Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M), h. 104.

<sup>56</sup>Muhammad bin ‘Abdul Ḥādī Abū al-Ḥasan al-Sindī, *Hāsyiah al-Sindī ‘alā Sunan al-Nasā’ī*, Juz. 4 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1406 H/1986 M), h. 87.

<sup>57</sup>‘Abdurrahmān bin Abī Bakr Jalāluddīn al-Suyūṭī, *Hāsyiah al-Suyūṭī ‘alā Sunan al-Nasā’ī*, Juz. 4 (Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū’āt al-Islāmiyah, 1406 H/1986 M), h. 87.

<sup>58</sup>Ibnu al-Mulaqqin Sirājuddīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Ahmad al-Syāfi’ī al-Miṣrī, *Mukhtaṣar Istidrāk al-Ḥāfiẓ al-Zahabī ‘alā Mustadrak Abī ‘Abdillāh al-Ḥākim*, Juz. 1 (Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āshimāh, 1411 H/1990 M), h. 291.

<sup>59</sup>Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-‘Abdarī al-Fāsī, *Al-Madkhal*, Juz. 3 (Dār al-Turāṣ), h. 272.

<sup>60</sup>Abū ‘Abdirrahmān Muhammad Nāṣiruddīn al-Albānī, *Aḥkām al-Janāiz*, (Cet. IV; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1406 H/1986 M), h. 206.

Dan ini pula yang merupakan sebab pembolehnannya, yaitu sebagai penanda pada makam. Berkata *Ibnu 'Usaimin*:

الْكِتَابَةُ الَّتِي لَا يُرَادُ بِهَا إِلَّا اثْبَاتُ الْإِسْمِ لِلدَّلَالَةِ عَلَى الْقَبْرِ فَهَذِهِ لَا بَأْسَ بِهَا<sup>61</sup>

Artinya:

Penulisan yang hanya dimaksudkan untuk mencantumkan nama sebagai penanda kuburan, maka hal ini tidak mengapa.

Ini selaras dengan pendapat sejumlah ulama yang membolehkannya sebatas tanda pengenal, di antaranya adalah *Ibnu Nujaim*<sup>62</sup>, *al-Zayla'i*<sup>63</sup> dan *Badruddin al-'Aini*.<sup>64</sup>

Juga mengingat bahwa perkara ini adalah tradisi yang telah berjalan dari semenjak dahulu, berkata *al-Hakim*:

فَإِنَّ أُمَّةَ الْمُسْلِمِينَ مِنَ الشَّرْقِ إِلَى الْعَرَبِ مَكْتُوبٌ عَلَى قُبُورِهِمْ، وَهُوَ عَمَلٌ أَخَذَ بِهِ الْخَلْفُ عَنِ السَّلَفِ<sup>65</sup>

Artinya:

Sesungguhnya para pemimpin kaum muslimin dari timur hingga barat, pada makam-makam mereka tertulis (nama), dan itu adalah suatu amalan yang diikuti oleh generasi belakangan dari generasi terdahulu.

Ini menunjukkan adanya keringanan terkait penulisan nama pada batu nisan. Dilihat dari semua larangan tersebut mengarah pada pengagungan (memplaster dan membangun) serta mengarah pada perendahan (duduk di atasnya), sedangkan (menulisinya) mempunyai indikasi yaitu sebagai penanda dan pembeda antar makam. Dan inilah tujuan Nabi saw. memberi batu pada kubur 'Usmān bin Maz'un ra. kemudian beliau bersabda:

أَعْلَمُ بِهَا قَبْرَ أَخِي، وَأَذْفُنْ إِلَيْهِ مَنْ مَاتَ مِنْ أَهْلِي<sup>66</sup>

Artinya:

Supaya dengan batu itu aku mengetahui bahwa itu adalah kubur saudaraku dan aku bisa memakamkan keluargaku di dekatnya.

Maka seiring dengan banyaknya batu penanda makam yang memiliki bentuk dan ciri serupa, fungsi utama batu nisan sebagai penanda dan pembeda antar makam menjadi sulit tercapai. Dalam kondisi demikian, penulisan nama pada batu nisan memiliki peran penting dalam mewujudkan tujuan tersebut, yakni mempermudah identifikasi dan membedakan antar makam secara jelas.

<sup>61</sup>Muhammad bin Šāliḥ bin Muhammad al-'Usaimin, *Syarḥ Riyāḍ al-Šāliḥin*, Juz. 6 (Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H/2005 M), h. 522.

<sup>62</sup>Zainuddin bin Ibrāhīm bin Muhammad Ibnu Nujaim, *Al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanzī al-Daqāiq*, Juz. 2 (Cet. II; Madinah: Dār al-Kitāb al-Islāmī), h. 209.

<sup>63</sup>'Usmān bin 'Alī al-Zayla'i al-Ḥanafī, *Tabayīn al-Ḥaqāiq Syarḥ Kanzī al-Daqāiq wa Ḥāsyiah al-Syilbī*, Juz. 1 (Cet. I; Mesir: Al-Maṭba'ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1314 H/1897 M), h. 246.

<sup>64</sup>Muhammad bin Ahmad bin Mūsā bin Ahmad bin Ḥusain al-'Ainī, *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*, Juz. 3 (Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1420 H/2000 M), h. 259.

<sup>65</sup>Abū 'Abdillāh Muhammad bin 'Abdillāh al-Hākim al-Naisābūrī, *Al-Mustadrak 'alā al-Šaḥīḥain*, Juz. 2 (Beirut: Dār ar-Risālah al-'Ālamiyyah, 1439 H/2018 M), h. 282.

<sup>66</sup>Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy'as al-Sijistānī, *Sunan Abū Dāwud*, Juz. 3, h. 212.

## KESIMPULAN

Berdasarkan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa *maṣlaḥah mursalah* memiliki perselisihan yang kuat di tengah para ulama. Ada yang berpendapat bahwa ia adalah hujah secara mutlak, ada yang mengingkari kehujuannya secara mutlak, dan ada yang menganggapnya sebagai hujah akan tetapi dengan syarat. Kendati demikian, tidak sedikit ulama yang menukil pendapat jumhur (mayoritas) pada pembolehannya (penerapannya). Dalam penulisan nama pada batu nisan, para ulama pun berbeda pendapat terkait hukumnya. Ada yang berpendapat makruh seperti pendapat empat mazhab (Hanafi, Maliki, Syafii, Hambali), ada yang membolehkannya secara mutlak (*Zāhiri*), ada yang melarangnya secara mutlak (*al-Syaukānī, al-Sindī, al-‘Irāqī, al-Zahabī, Ibnu al-Hājj, Ibnu Bāz, al-Lajnah al-Dāimah*), dan ada yang membolehkannya dengan syarat (*Ibnu Nujaim, al-Zayla‘ī, Badruddīn al-‘Ainī, al-Albānī, Ibnu ‘Usaimīn, Dār al-‘Iftā‘ al-Miṣriyah*).

Juga dapat disimpulkan bahwa penulisan nama pada batu nisan tidak begitu relevan dengan *maṣlaḥah mursalah*, akan tetapi praktik ini lebih relevan dengan kemaslahatan secara umum dan tujuan syariat. Sehingga hukum yang asalnya adalah sebuah larangan, menjadikannya diperbolehkan pada kondisi dimana batu nisan tidak lagi cukup sebagai penanda dan pembeda pada makam dikarenakan banyaknya kuburan dan batu penanda yang memiliki keserupaan sebagaimana yang telah diisyaratkan oleh *al-Albānī* dan *Ibnu ‘Usaimīn*.

## DAFTAR PUSTAKA

*Al-Qur‘ān al-Karīm*

Buku:

Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā. *Al-Muwāfaqāt*. Juz 2. Cet. I; Mesir: Dār Ibnu ‘Affān, 1417 H/1997 M.

Anas, bin Mālik. *Muwaṭṭa‘ al-Imām Mālik*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Risālah, 1412 H/1991 M.

Al-Jīzānī, Muhammad bin Husain bin Hasan. *Ma‘ālim Ushūl al-Fiqhi ‘Inda Ahli al-Sunnah wa al-Jamā‘ah*. Cet. IX; Saudi: Dār Ibnu al-Jauzī, 1427 H/2006 M.

Al-‘Anazī, ‘Abdullah bin Yūsuf bin ‘Īsā bn Ya‘qūb al-Judaī. *Taisir ‘Ilmu Uṣul al-Fiqhi*. Cet. I; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1418 H/1997 M.

Al-Sijistānī, Abū Dāwud Sulaimān bin al-Asy‘as. *Sunan Abū Dāwud*. Juz 3. Beirut: Maktabah al-‘Aṣriyah, 1422 H/2002 M.

Al-Miṣrī, Ibnu al-Mulaqqin Sirājuddīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Ahmad al-Syāfi‘ī. *Al-Badru al-Munīr fī Takhrīj al-Aḥādīs wa al-Āṣār al-Wāqī‘ah fī al-Syarh al-Kabīr*. Juz 5. Cet. I; Riyadh: Dār al-Hijrah li an-Nasyr wa al-Tauzī‘, 1425 H/2004 M.

Al-Mizzī, Jamāluddīn Abū al-Ḥajjāj Yūsuf bin al-Zakī ‘Abdirrahmān bin Yūsuf. *Tuḥfah al-Asyraf bi Ma‘rifah al-Aṭraf*. Juz 2. Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1403 H/1983 M.

Ibnu Manzūr, Muhammad bin Mukrim bin ‘Alī Abū al-Faḍl Jamaluddin. *Lisānu al-‘Arab*. Juz 2. Cet. III; Beirut: Dār Ṣadr, 1414 H/1994 M.

Al-Gazālī, Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustaṣfā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyah, 1413 H/1993 M.

- Al-Namlah, 'Abdul Karīm bin 'Alī bin Muhammad. *Al-Muhazzab fī 'Ilmi Uṣūl al-Fiqhi al-Muqāran*. Juz 3. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah al-Rasyd, 1420 H/1999 M.
- Al-Subkī, 'Ali bin 'Abdu al-Kāfi. *Al-Ibhāj fī Syarḥ al-Minhāj*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1404 H/1984 M.
- Al-Itrabī, Muhammad Ṣāliḥ Muhammad. *Al-Turūk al-Nubuwah Ta'ṣīlan wa Taṭbīqan*. Juz 1. Cet. I; Qatar: Wizārah al-Auqāf wa al-Syu'ūn al-Islāmiyah, 1433 H/2012 M.
- Al-Syaukānī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh. *Irsyād al-Fuḥūl ilā Taḥqīq al-Haq min 'Ilm al-Uṣūl*. Juz 2. Cet. I; Beirut: Dār al-Kitāb al-'Arabī, 1419 H/1999 M.
- Al-Zarkasyī, Abū 'Abdillāh Badruddīn Muhammad bin 'Abdillah. *Al-Baḥr al-Muḥiṭ fī Uṣul al-Fiqh*. Juz 8. Cet. I; Mesir: Dār al-Kutubī, 1414 H/1994 M.
- Al-Āmidī, Sayfuddīn Abu al-Ḥasan 'Alī bin Muhammad. *Al-Iḥkām fī Uṣul al-Aḥkām*. Juz 4. Cet. II; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1402 H/1982 M.
- Al-Maqdisī, Muwaffaquddīn 'Ābduḥ al-Ḥamad bin Qudāmah. *Rauḍah al-Nazir wa Junnah al-Munāzir*. Juz 1. Cet. II; Beirut: Muassasah al-Rayyān, 1423 H/2002 M.
- Al-Syāṭibī, Abū Ishāq Ibrāhīm bin Mūsā bin Muhammad al-Lakhmī. *Al-I'tisām*. Juz 2. Cet. I; Saudi: Dār Ibnu 'Affān, 1412 H/1992 M.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid Muhammad bin Muhammad. *Al-Mustaşfā*. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1413 H/1993 M.
- Al-Qarāfī, Syihābuddīn Aḥmad bin Idrīs. *Nafā'is al-Uṣūl fī Syarḥ al-Maḥṣūl*. Juz 9. Cet. I; Riyāḍ: Maktabah Nazār Muṣṭafā al-Bāz, 1416 H/1995 M.
- Al-Kāsānī, 'Alāuddīn Abū Bakr bin Mas'ūd. *Badā'ī' al-Ṣanā'ī' fī Tartīb al-Syarā'ī'*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1327 H/1926 M.
- Al-'Alaisyi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad. *Manḥu al-Jalīl Syarḥu Mukhtaṣar Khalīl*. Juz 1. Cet. I; Beirut: Dār al-Fikr, 1404 H/ 1984 M.
- Al-Nawawī, Abū Zakariyā Muhyiddīn Yahyā bin Syaraf. *Al-Majmū' Syarhu al-Muhazzab*. Juz 5. Kairo: Idarotu al-Thiba'ah al-Muniriyah, 1344 H/1926 M.
- Ibnu Qudāmah, Muwaffaquddīn Abū Muhammad 'Abdullāh bin Ahmad bin Muhammad. *Al-Mugnī*. Juz 2. Cet. I; Mesir: Maktabah al-Qāhīroh, 1388 H/1968 M.
- Ibnu Ḥazm, Abū Muhammad 'Alī bin Ahmad bin Sa'īd. *Al-Muḥallā bi al-Āṣār*. Juz 3. Beirut: Dār al-Kutub al-'Alamiyah, 1408 H/1988 M.
- Al-Iftā', Al-Lajnah al-Dāimah li al-Buḥūs al-'Ilmiyah. *Fatāwā al-Lajnah al-Dāimah al-Majmū'ah al-Ūlā*. Juz 9. Riyādh: Idārah al-'Āmmah li al-Ṭib', 1390 H/1971 M.
- Al-Miṣriyah, Dār al-Iftā' al-Miṣriyah. *Fatāwā Dār al-Iftā'*. Juz 8. Mesir: 1895 M/1314 H.
- Al-Syinqīṭī, Muhammad bin Muhammad al-Mukhtār. *Syarḥ Zād al-Mustaḥṣin*. Juz 86. Al-Syabakah al-Islāmiyah: Durūs Ṣautiyah.
- Bin Bāz, 'Abdul 'Azīz bin 'Abdillāh bin 'Abdirraḥmān. *Majmū' Fatāwā wa Maqālāt Mutanawwi'ah*. Juz 13. Saudi: Idārah al-Buḥūs al-'Ilmiyah wa al-Iftā'.
- Al-Zuhailī, Muhammad Muṣṭafā. *Al-Qawā'id al-Fiqhiyah wa Taṭbīqātuhā fī Maḥāhib al-Arba'ah*. Juz 1. Cet. I; Damaskus: Dār al-Fikr, 1427 H/2006 M.
- Al-Syaukānī, Muhammad bin 'Alī bin Muhammad bin 'Abdillāh. *Nail al-Auṭār*. Juz 4. Cet. I; Mesir: Dār al-Ḥadīṣ, 1413 H/1993 M.
- Al-Sindī, Muhammad bin 'Abdul Hādī Abū al-Ḥasan. *Ḥāsyiah al-Sindī 'alā Sunan al-Nasā'ī*. Juz 4. Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406 H/1986 M.
- Al-Suyūṭī, 'Abdurraḥmān bin Abī Bakr Jalāluddīn. *Ḥāsyiah al-Suyūṭī 'alā Sunan al-Nasā'ī*. Juz 4. Cet. II; Aleppo: Maktab al-Maṭbū'āt al-Islāmiyah, 1406 H/1986 M.

- Al-Miṣrī, Ibnu al-Mulaqqin Sirājuddīn Abū Ḥafṣ ‘Umar bin ‘Alī bin Ahmad al-Syāfi‘ī. *Mukhtaṣar Istidrāk al-Ḥāfiẓ al-Zahabī ‘alā Mustadrak Abī ‘Abdillāh al-Ḥākim*. Juz 1. Cet. I; Riyadh: Dār al-‘Āṣimah, 1411 H/1990 M.
- Al-Fāsī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin Muhammad bin Muhammad al-‘Abdarī. *Al-Madkhal*. Juz 3. Dār al-Turās.
- Al-Albānī, Abū ‘Abdirraḥmān Muhammad Nāṣiruddīn. *Aḥkām al-Janāiz*. Cet. IV; Beirut: Al-Maktab al-Islāmī, 1406 H/1986 M.
- Al-‘Uṣaimīn, Muhammad bin Ṣāliḥ bin Muhammad. *Syarḥ Riyāḍ al-Ṣāliḥīn*. Juz 6. Riyadh: Dār al-Waṭan li al-Nasyr, 1426 H/2005 M.
- Ibnu Nujaim, Zainuddīn bin Ibrāhīm bin Muhammad. *Al-Baḥr al-Rāiq Syarḥ Kanzī al-Daqāiq*. Juz 2. Cet. II; Madinah: Dār al-Kitāb al-Islāmī.
- Al-Ḥanafī, ‘Usmān bin ‘Alī al-Zayla‘ī. *Tabyīn al-Ḥaqāiq Syarḥ Kanzī al-Daqāiq wa Ḥāsyiah al-Syilbī*. Juz 1. Cet. I; Mesir: Al-Maṭba‘ah al-Kubrā al-Amīriyah, 1314 H/1897 M.
- Al-‘Ainī, Muhammad bin Ahmad bin Mūsā bin Ahmad bin Ḥusain. *Al-Bināyah Syarḥ al-Hidāyah*. Juz 3. Cet. I; Beirut: Dār al-Kutub al-‘Alamiyah, 1420 H/2000 M.
- Al-Naisābūrī, Abū ‘Abdillāh Muhammad bin ‘Abdillāh al-Ḥākim. *Al-Mustadrak ‘alā al-Ṣaḥīḥain*. Juz 2. Beirut: Dār ar-Risālah al-‘Ālamiyah, 1439 H/2018 M.

Jurnal ilmiah:

- Haddade, Sirajuddin, Kasjim Salenda and Abdul Wahid. "Peniadaan Shalat Jumat Dalam Surat Edaran Gubernur SULSEL Nomor: 451.11/2057/2020 Selama Pandemi COVID-19 Perspektif *Maqāṣid al-Syarī‘ah*". *Nukhbatul ‘Ulum: Jurnal Bidang Kajian Islam* 6, no. 2 (2020). h. 297.
- Waruwu, Marinu. "Pendekatan Penelitian Pendidikan: Metode Penelitian Kualitatif, Metode Penelitian Kuantitatif dan Metode Penelitian Kombinasi (Mixed Method)". *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7, no. 1 (2023). h. 2897.
- Rijali, Ahmad. "Analisis Data Kualitatif". *Alhadharah: Jurnal Ilmu Dakwah* 17, no. 33 (2018). h. 86.
- Sidik, Parid. "Pendekatan Normatif Sebagai Metodologi Penelitian Hukum Islam". *Al-Syarī: Jurnal Bimbingan dan Konseling Keluarga* 5, no. 3 (2023). h. 1013.
- Afif, Zihnil, Devi Syukri Azhari, Martin Kustati and Nana Sepriyanti. "Penelitian Ilmiah (Kuantitatif) Beserta Paradigma, Pendekatan, Asumsi Dasar, Karakteristik, Metode Analisis Data Dan Outputnya". *Innovative: Journal of Social Science Research* 3, no. 3 (2023). h. 689.
- Astuti, Hepy Kusuma. "Penanaman Nilai-Nilai Ibadah di Madrasah Ibtidaiyah dalam Membentuk Karakter Religius". *Mumtaz: Jurnal Pendidikan Agama Islam* 1, no. 2 (2022). h. 63.
- Hendrik, M. Alfin Fatikh and Wahyu. "Komunikasi Kultural Islam dan Budaya". *Al-Tsiqoh: Jurnal Ekonomi dan Dakwah Islam* 7, no. 2 (2022).
- Hasanah, Azzahra, Mawarni and Ainun Wardatul. "Akulturasi Islam Dan Budaya Dalam Prosesi Pemakaman". *Suspendis: Sosiologi Pendidikan Dan Pendidikan IPS* 1, no. 1 (2023).
- Rusfi, Mohammad. "Validitas Maslahah Mursalah Sebagai Sumber Hukum". *Al-‘Adalah* 12, no. 1 (2014). h. 66.

Qorib, Ahmad and Isnaini Harahap. "Penerapan *Maşlahah Mursalah* dalam Ekonomi Islam". *Journal Analytica Islamica* 5, no. 1 (2016). h. 58.